

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Roda pembangunan nasional dapat terus bergerak dan perekonomian negara dapat terus tumbuh karena adanya penerimaan negara. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahunnya. Penerimaan negara yang berkesinambungan dimungkinkan dan layak dibangun adalah perolehan dari sektor pajak. Struktur penerimaan negara dalam APBN menempatkan penerimaan sektor pajak sebagai pos penerimaan terbesar.

Seperti yang kita ketahui pajak terbagi 2 berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau negara yang menyumbang penerimaan APBN paling tinggi yaitu berasal dari pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yang mempunyai objek pajak (penghasilan).

APBN Perubahan 2013, penerimaan pajak ditargetkan Rp 995,2 triliun atau 66 persen lebih dari target penerimaan negara tahun 2013 sebanyak 1.502 triliun. Keberhasilan dalam pemenuhan target dari sektor pajak untuk penerimaan negara tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun sayangnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Direktur Jenderal Pajak mencatat, wajib pajak orang pribadi, baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar.

Sedangkan untuk wajib pajak badan, Ditjen Pajak mencatat baru sekitar 520 wajib pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba.

Indikator paling kentara untuk menilai kepatuhan wajib pajak dapat kita lihat pada rasio penyampaian SPT Tahunan, yang secara sederhana merupakan perbandingan antara wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib melapor SPT Tahunan (tidak termasuk wajib pajak dengan status cabang, istri dan non efektif atau *delete*). Seperti yang kita ketahui SPT Tahunan terbagi 2 yaitu, SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. SPT Tahunan merupakan dokumen resmi pengakuan WP mengenai pengakuan penghasilan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Yang berarti SPT Tahunan berisikan tentang pajak penghasilannya.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu *pertama*, adanya kasus pegawai pajak tertangkap KPK dan memiliki rekening bank di luar kewajaran, dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak membayar pajak karena uang hasil pembayaran pajak akan dikorupsi oleh pegawai pajak. Untuk memberikan efek jera, DJP bekerjasama dengan KPK membuat sistem *whistle blower*, jika ada masukan dari wajib pajak.

Kedua, adanya penyalahgunaan dana proyek dari APBN dan APBD, yang dilakukan oleh oknum eksekutif dan oknum legislatif, menjadi alasan lain masyarakat bahwa membayar pajak menjadi sia-sia karena akan dikorupsi oleh pelaksana proyek. Solusi untuk hal ini diluar kewenangan DJP, karena melibatkan pihak yudikatif. Namun himbauan Presiden dan Kementrian Keuangan agar

satuan kerja kementerian/lembaga negara dan pemda untuk menghemat anggaran, sudah merupakan langkah awal pencegahan korupsi.

Ketiga, banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk alasan ini, Ditjen Pajak memberikan sosialisasi *on air* maupun tatap muka kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa.

Keempat, wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan. Kesan yang rumit terhadap administrasi perpajakan dan perhitungan serta tarif yang beragam menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal ini Direktorat Jenderal Pajak berupaya agar wajib pajak tidak menjadikan kesan rumitnya administrasi perpajakan sebagai salah satu alasan wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya membuat suatu peraturan yang mudah diingat dan dipahami oleh wajib pajak khususnya untuk jenis pajak penghasilan yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini membuat satu tarif tunggal dan sangat mudah diingat yaitu tarif pajak 1% terhadap jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.

Diharapkan dengan peraturan baru ini kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya meningkat dengan sukarela. Karena tidak adanya alasan lagi bagi wajib pajak mengenai rumitnya tarif pajak. Keberhasilan peraturan ini dapat kita lihat melalui perbandingan pemenuhan kewajiban wajib pajak yang bersangkutan setelah dan sebelum peraturan ini diterapkan.

Tujuan PP ini yaitu untuk memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Demi memenuhi tujuan dari PP ini DJP giat melakukan sosialisasi mengenai PP ini. Sosialisasi pun telah dilakukan melalui media cetak ataupun elektronik. Himbauan sosialisasi pada KPP pun telah dilakukan, baik terhadap wajib pajak baru maupun kepada wajib pajak lama. Diharapkan setelah masyarakat mengetahui peraturan baru ini bertambahnya wajib pajak yang melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu terutama wajib pajak orang pribadi yang jumlahnya cukup besar di Indonesia.

Dasar hukum pajak penghasilan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak mengenai Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah karya tulis berjudul: **“Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci”**.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang penulis sampaikan yaitu:

Bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Untuk Orang Pribadi pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui sejauh mana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci.”

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dituangkan dalam tulisan ini, yaitu:

- a. Sebagai sumber informasi dan pedoman bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Sebagai sarana dan media untuk menambah wawasan penulis dalam masalah pajak penghasilan khususnya mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- c. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi para pegawai dan staf pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci.
- d. Sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulisan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci yang beralamat di Jalan Pamong Praja Komplek Perkantoran Bahkti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Penulisan ini direncanakan selama 2 bulan terhitung sejak Maret s/d April.

1.4.2 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis melalui secara langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dalam bentuk laporan, catatan, buku-buku dan dokumen yang terkait melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu penulis mengamati langsung ke lapangan dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Interview

Yaitu penulis mengajukan pertanyaan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.

I.5. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam penulisan. Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI

Dalam bab ini menjelaskan deskriptif atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci, uraian tugas, struktur unit kerja dan uraian tugas pokok dan fungsinya.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisikan pembahasan pengertian pajak, pengelompokan pajak, penjelasan isi PP No. 46 Tahun 2013, mekanisme PP No. 46 Tahun 2013, subjek PP No. 46 Tahun 2013, objek PP No. 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan, kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA